

# ALTERNATIF MODEL PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA MENGHADAPI ERA GLOBALISASI

Oleh:  
**Ahmad Buchari<sup>1</sup>**

## **Abstract**

*The Indonesian economic development which emphasized on economic growth has resulted in prolonged multi-crisis. The crisis has caused personal imbalance within overall development stakeholders in addition to structural and hierarchal ones. Defying these phenomena, two, preferably-combined, strategies should be taken into action: first, revitalizing or empowering micro, small and medium enterprises as community-based economic development; and second, re-actualizing social development in conjunction with economic development. Through these strategies, it is expected that redistribution with high economic growth can sustainably be achieved.*

*Keywords: economic growth, revitalization, re-actualization*

## **A. Pendahuluan**

Pada abad ke-21, dunia mengalami berbagai transformasi dalam segala aspek kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan sebagainya. Proses transformasi tersebut selaras dengan kekuatan yang mendorong globalisasi, antara lain: (1) globalisasi dari proses industrialisasi, (2) globalisasi keuangan, komunikasi, dan informasi, (3) globalisasi kekayaan, pekerjaan dan migrasi, (4) globalisasi efek polusi biosfir terhadap kehidupan manusia, (5) globalisasi dari perdagangan persenjataan, dan (6) globalisasi kebudayaan, konsumsi, dan media massa (Tilaar, 1997).

Dalam konteks globalisasi sosial ekonomi, cepat atau lambat Indonesia akan diperhadapkan dengan beberapa agenda global maupun regional, antara lain: (1) *General Agreement of Tariffs and Trade* (GATT), *World Trade Organization* (WTO), *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), dan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Dengan demikian bagi kelompok yang optimis, arus globalisasi dapat disiasati sebagai peluang untuk melakukan lompatan transformatif yang progresif dalam rangka melakukan ekspansi pasar. Sedangkan bagi kelompok yang pesimis, globalisasi sosial ekonomi dipandang sebagai ancaman dari bangsa lain, atau predator yang akan memangsa mereka yang lemah (Rustiani, 1996).

Mencermati realita perekonomian Indonesia dalam konteks ekonomi global, Sjahrir (2001) mengemukakan bahwa, suasana internal dan eksternal ekonomi Indonesia pada saat ini menunjukkan fenomena yang kurang menggembirakan. Untuk itu bangsa Indonesia perlu melakukan prioritas dalam memulihkan ekonomi. Jika hal ini tidak segera dilakukan, maka akan menimbulkan berbagai konsekuensi serius, antara lain: (1) semakin meningkatnya harga barang (tingkat inflasi yang tinggi), (2) pengangguran yang semakin membengkak (apalagi pengangguran yang terjadi pada kaum intelektual), (3) kemiskinan struktural yang semakin memilukan, (4) utang yang semakin menggunung baik pada luar negeri maupun dalam negeri, dan (5) pertumbuhan ekonomi yang semakin rendah. Hal ini akan mempengaruhi kondisi sosial politik dan semakin rawannya desintegrasi bangsa,

---

<sup>1</sup> Drs. Achmad Buchari, M.Si. adalah staf pengajar Fisip Uniga.

serta potensi konflik atau kerusuhan yang terjadi di tingkat masyarakat lapisan bawah (*grass-root*) cenderung semakin terbuka.

Selaras dengan pendapat tersebut, maka pertanyaan yang akan dianalisis dalam tulisan ini adalah: (1) pembangunan ekonomi manakah yang seyogianya menjadi prioritas?, dan (2) model pembangunan ekonomi bagaimanakah yang efektif dan strategis untuk digunakan dalam melakukan pemulihan ekonomi Indonesia sehingga dapat berperan dalam situasi saling menguntungkan (*win-win situation*) dalam persaingan ekonomi global?

## B. Realitas Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada pertumbuhan (*growth*), yang telah dilaksanakan selama 32 tahun, menimbulkan berbagai konsekuensi serius dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya.

Beberapa konsekuensi serius yang menyebabkan rapuhnya fondasi ekonomi Indonesia, antara lain:

1. Utang pemerintah yang semakin menggunung, yaitu utang luar negeri sebesar 133 milyar dollar (sama dengan empat kali lipat lebih dari volume anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun, atau 100 persen lebih dari Produk Domestik Bruto/PDB) dan utang dalam negeri sebesar 600 milyar dollar (Kompas, 11 April 2002).
2. Di kawasan Asia Tenggara, pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia semakin rendah (3,0 persen), hanya menempati urutan kedua dari bawah atau setingkat di atas Thailand (Kompas, 11 April 2002).
3. Terjadinya struktur pasar distortif, seperti: pasar monopoli, oligopoli, kartel, ofensif, dan sebagainya (Damanhuri, 1996).
4. Semakin meningkatnya harga barang (tingkat inflasi yang tinggi).
5. Terjadinya ketidakseimbangan atau ketimpangan *inter-regional*, ketimpangan antar pedesaan, kawasan perkotaan, serta eksploitasi besar-besaran sumber daya alam di pedesaan yang menimbulkan dampak eksternalitas yang menciptakan biaya sosial yang tinggi.

Dalam tataran realitas politik, dampak pembangunan ekonomi dapat dicermati dari:

1. Munculnya fenomena kekerasan politik untuk tujuan tertentu, seperti: demonstrasi dengan kekerasan, penculikan, penyanderaan, perampokan untuk biaya perjuangan politik, intimidasi, adu domba, pengeboman, menciptakan ketegangan atau kerusuhan untuk *destabilisasi* situasi, eksekusi peradilan jalanan oleh kelompok tertentu, dan sebagainya (Kompas, 29 September 2001, hal. 4). Aditjondro (2001) mengemukakan bahwa, ada lima agenda militer yang melanggengkan kerusuhan, antara lain: (a) militer ingin membalas oposisi para mahasiswa terhadap dwifungsi ABRI dengan mengalihkan konflik vertikal menjadi konflik horizontal, (b) militer ingin mempertahankan konsep wawasan nusantara, (c) militer ingin mempertahankan struktur teritorial TNI, khususnya Angkatan Darat, (d) militer ingin mempertahankan kepentingan bisnis militer (saat ini bisnis kawal-mengkawal di Maluku sangat *profitable*), dan (e) militer ingin mencegah pemeriksaan dan peradilan para perwira tinggi dan purnawirawan TNI yang dituduh terlibat kejahatan korupsi serta pelanggaran HAM.
2. Munculnya kelompok-kelompok *pro status quo* yang hanya ingin mempertahankan kedudukan atau *vested interested*, dengan jalan korupsi, kolusi, dan nepotisme, baik

di lembaga eksekutif (pemerintahan), legislatif (MPR/DPR/DPRD), maupun yudikatif. Beberapa waktu lalu Harian Kompas melansir berita yang bertajuk "Negeri Sarat Korupsi" (Kompas, hal 8, tanggal 17 September 2001). Disamping ketiga lembaga tersebut, ternyata praktek korupsi juga turut melanda institusi pendidikan (18,1%), kesehatan (21,2%) bahkan lembaga keagamaan (27,7%). Menurut lembaga *Transparency International*, Indonesia termasuk dalam kategori negara terkorup nomor tiga (1999), nomor empat (2000) dan nomor dua (2001) di dunia.

3. Munculnya kelompok-kelompok yang mencari untung (*rent seeking economic activities*) dengan berupaya tetap meminjam dari luar negeri dengan harapan akan memperoleh *share* tertentu. Damanhuri (1996) mengutip pendapat Robinson dan Chopponiere, bahwa ada beberapa kelompok ilmuwan di Indonesia yang memberikan pertimbangan terhadap pengambilan keputusan ekonomi, antara lain: (a) kelompok pertama yaitu kalangan teknokrat yang duduk di Bappenas dan Departemen Keuangan. Mereka adalah penganut paham kebebasan pasar terkendali. Mereka membenarkan intervensi negara dalam politik ekonomi untuk memperoleh pertumbuhan dan pemerataan sekaligus (delapan jalur pemerataan); (b) kelompok kedua, yaitu mereka yang berpusat di CSIS (aliansi beberapa jenderal dengan sekelompok pemodal swasta besar). Mereka mendukung bangkitnya proses konglomerasi dan mendambakan semacam timbulnya *Indonesia Incorporated*. Jumlah konglomerat sekitar 200 orang atau sekitar 58 persen yang menguasai GNP Indonesia. Kelompok konglomerat lain yang masih bermasalah terkait dengan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), yaitu: Grup Salim, Usman Admadjaja, Mohamad "Bob" Hasan, Sjamsul Nursalim, Kaharuddin Ongko, Bank Modern, Bank Hokindo, dan Ibrahim Risjad (kompas, 7 Maret 2002, p : 15; dan (c) kelompok ketiga yaitu para insinyur yang dipimpin oleh H.J. Habibie dan mereka yang ada di Departemen Perindustrian. Mereka menyiapkan Indonesia untuk memasuki *high tech* dalam abad XXI, serta menjadikan industrialisasi sebagai "proses yang memimpin".

Konsekuensi pembangunan ekonomi dalam aspek sosial budaya dan lingkungan dapat dicermati melalui berbagai ketimpangan, antara lain:

1. Terjadinya ketimpangan personal, seperti: lunturnya nilai-nilai moral, pengusuran masyarakat secara tidak manusiawi (kompas, 20 Pebruari 1997), kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat kecil, hilangnya budaya malu atau rasa malu (kompas, 18 April 2002), dan munculnya rasa prihatin terhadap berbagai perilaku yang tidak normatif dari pejabat negara baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pejabat negara lebih cenderung untuk memperjuangkan kepentingannya (misalnya kenaikan gaji anggota dewan, lebih suka studi banding, lebih suka membolos dari pada mengikuti rapat, dan sebagainya). Isu-isu politik seperti *Bulog-gate*, *Brunei-gate*, dan *gate-gate* lainnya lebih diperjuangkan dari pada: (a) menegakan supremasi hukum, (b) menegakan keadilan dan menghargai hak-hak asasi manusia, (c) memberantas KKN sampai ke akar-akarnya, (d) melakukan berbagai upaya efisiensi dan komitmen moral untuk mencari solusi terhadap utang luar negeri yang kian menggunung, (e) mencari solusi terhadap kerusakan di berbagai daerah yang tak kunjung berakhir, dan sebagainya.
2. Ketimpangan struktural dan relasi kekuasaan, seperti munculnya kelompok-kelompok tertentu ("laskar-laskaran", "forum-foruman", "pemuda-pemudaan", dan sebagainya) yang beratribut tertentu sebagai panggilan moral untuk

melegitimasi kegiatannya. Padahal kegiatan yang dilakukan sesungguhnya berseberangan dengan hukum positif yang berlaku. Hal ini nampaknya di desain oleh para elit negara untuk mempertahankan *status quo*-nya. Di sisi lain, muncul pula kelompok yang berkuasa (kaum feodalis) versus kelompok pinggiran (kaum marginal). Semua ini menimbulkan ketimpangan dalam berelasi, atau dalam melakukan hubungan kemitrasetaraan yang pada akhirnya menimbulkan hubungan eksploitatif (neo-kapitalisme) yang merugikan kaum lemah. Fenomena ini selaras dengan hasil *pooling* pendapat yang dilakukan oleh Kompas (kompas, Tanggal 8 Oktober 2001, p: 8), bahwa perlakuan yang diterima warga negara selama ini 72,7 persen belum adil. Menurut responden tidak ada satu institusi keadilan di negeri ini yang sudah mempraktekan keadilan bagi masyarakat. Institusi kehakiman, kejaksaan dan kepolisian pun belum mencerminkan keadilan (71 persen). Lebih parah lagi MA yang dipandang sebagai benteng akhir untuk mencari keadilan ternyata hanya 2,3 persen. Ketidakadilan ini tercermin dalam penuntasan berbagai kasus yang menyangkut politik, ekonomi, KKN, dan pelanggaran HAM. Hilangnya kewibawaan kaum penegak hukum dalam menerapkan rasa keadilan masyarakat tampaknya menjadi batu sandungan kian terpuruknya lembaga peradilan di mata publik. Akhirnya masyarakat (responden) meyakini bahwa hanya 15 persen kebenaran hukum yang masih dipegang oleh penegak hukum.

3. Ketimpangan relasi manusia dengan alam terlihat dari tindakan manusia yang bersifat eksploitatif (penebangan liar, pembakaran hutan, pengrusakan terumbu karang, mangrove, menggunakan teknologi produksi maupun pasca panen yang tidak ramah lingkungan dan sebagainya) terhadap lingkungan hidup sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Hal ini dapat ditelusuri dengan adanya berbagai bencana alam seperti : banjir yang menggenangi Jakarta beberapa waktu lalu, menurunnya hasil produksi (kasus beras yang masih di impor), dan indikasi terjadinya rawan pangan di beberapa daerah, khususnya di Jawa Barat.

Mencermati berbagai perilaku aparaturnya yang tidak normatif (tidak sesuai dengan sistem nilai, etika, moral, dan ajaran agama) sebagai konsekuensi logis yang ditimbulkan melalui pembangunan ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi ketidakseimbangan dalam penggunaan berbagai sumber daya dan ketidaktentraman dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada pertumbuhan telah menghasilkan pembangunan bangsa yang tidak bermartabat, bangsa yang berhutang, bangsa yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di atas segala-galanya. Padahal, pembangunan pada hakekatnya adalah:

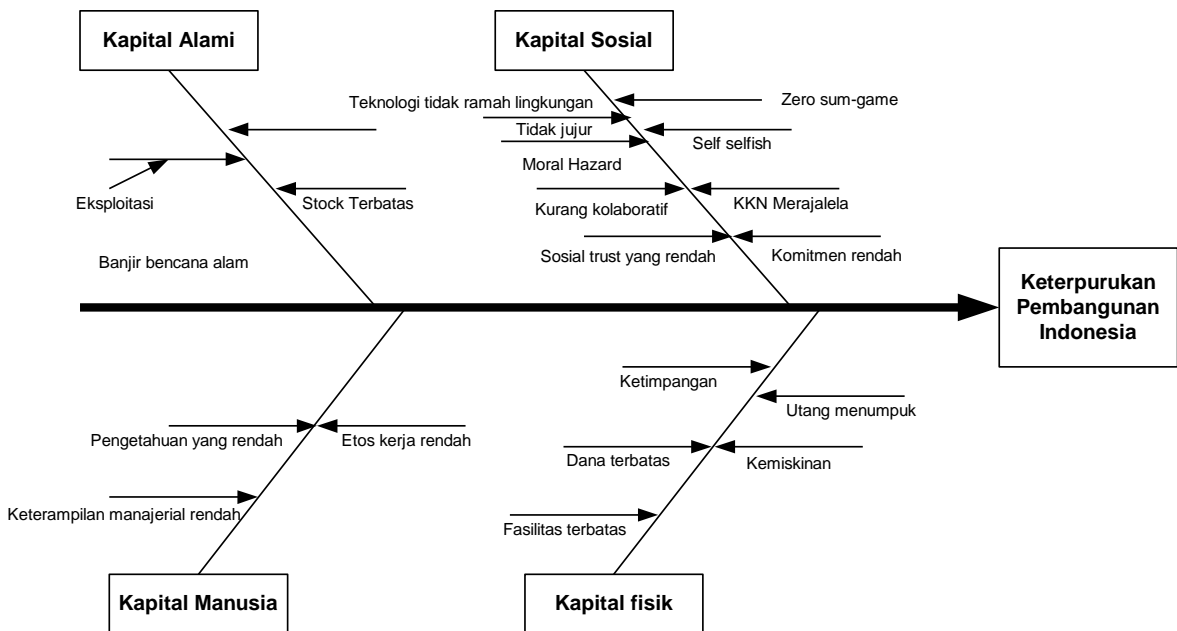
1. untuk meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat, seperti: pendapatan, pendidikan, pangan, konsumsi, dan kesehatan;
2. untuk menumbuhkan harga diri masyarakat, harkat dan martabat dan saling menghormati/menghargai;
3. untuk memperluas dan meningkatkan pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan nyata mereka;
4. untuk meningkatkan pencapaian nilai budaya mereka.

Deskripsi tersebut merupakan paradok pembangunan ekonomi yang dilakukan selama ini. Robert Rotberg, Direktur Program Konflik John F. Kennedy School of Government, mengemukakan bahwa Indonesia akan selamat dan terlindung dari bahaya menjadi **negara-negara yang gagal**, apabila negeri ini memiliki kepemimpinan yang kuat dan visioner (Kompas, 28 Maret 2002). Selaras dengan pendapat tersebut dan menyadari akan berbagai kekurangan/ kelemahan serta mengantisipasi berbagai peluang dan ancaman

yang akan terjadi dalam konteks global, maka diperlukan suatu upaya menemukan alternatif model pembangunan ekonomi Indonesia sebagai jawaban dari berbagai kekurangan tersebut.

### C. Alternatif Model Pembangunan Ekonomi Indonesia

Anwar (2002) mengemukakan bahwa, kebijakan yang menyangkut pembangunan di masa lalu sampai sekarang dianggap hampir identik dengan pemusatan perhatian kepada kebijakan pertumbuhan ekonomi nasional yang menekankan pada akumulasi kapital fisik (*physical capital*) yang bersifat sentralistik dan mengabaikan yang lain, seperti: (1) kapital alami (*natural capital*), (2) kapital manusia (*human capital*), dan (3) kapital sosial (*social capital*). Ketidakseimbangan antar kapital tersebut telah melahirkan multikrisis dalam pembangunan selama ini. Untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap faktor penentu keberhasilan pembangunan. Berdasarkan hasil analisis sederhana melalui diagram tulang ikan (*fish bone diagram*) ditemukan bahwa, ternyata kapital sosial (*social capital*) yang merupakan faktor penentu krusial dalam menentukan keberhasilan pembangunan, disamping ketiga kapital lainnya (gambar 1).



**Gambar 1**  
**Faktor Penentu Krusial dalam Menentukan Keberhasilan Pembangunan**

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka pendekatan model alternatif pembangunan ekonomi Indonesia dapat dilakukan melalui dua strategi, yaitu: (1) revitalisasi usaha mikro/kecil dan menengah, dan (2) reaktualisasi pembangunan sosial seiring pembangunan ekonomi.

#### 1. Revitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha mikro adalah usaha yang jumlah asetnya kurang dari Rp 2 juta dan jumlah omset perhari kurang dari Rp 500 ribu. Usaha kecil/menengah adalah usaha yang kepemilikan kekayaannya paling besar Rp 200 juta dan memiliki omset tahunan sampai Rp 10 milyar (undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil dan menengah). Pada tahun 2000, jumlah lembaga keuangan mikro (LKM) yang mendampingi pengusaha mikro berjumlah 53.644 LKM dan LKM non bank sekitar 42.186 unit (Chotim dan

Handayani, 2001). Jumlah usaha kecil dan menengah pada tahun 2001, masing-masing 40.137.773 dan 57.743 unit, sedangkan usaha besar masing-masing 2.005 dan 2.095 unit (Kompas, 6 Maret 2000, p: 15). Dari segi jumlah penyerapan tenaga kerja dan kontribusi tenaga kerja disajikan dalam Tabel 1 dan Tabel 2.

**Tabel 1**  
**Laju Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Kecil, Menengah dan Besar**  
**Tahun 1997-2001**

Jenis usaha	Tahun					Laju Pertumbuhan
	1997	1998	1999	2000	2001	
Kecil	57.482.688	57.341.962	59.939.760	63.501.890	65.246.294	3.22
Menengah	7.726.268	6.791.611	7.230.084	7.630.398	7.993.499	0.85
Besar	392.635	364.493	366.478	368.413	406.215	0.85
Total	65.601.591	64.678.006	67.536.322	71.518.701	73.646.008	2.93

Sumber : Kompas, 6 Maret 2002

**Tabel 2**  
**Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Kecil, Menengah dan Besar**  
**Tahun 1997-2001**

Jenis usaha	Tahun					Laju Pertumbuhan
	1997	1998	1999	2000	2001	
Kecil	87.62	88.60	88.75	88.79	88.59	0.28%
Menengah	11.78	10.78	10.71	10.67	10.85	-2.02%
Besar	0.6	0.56	0.54	0.54	0.55	-2.02%
Total	100	100	100	100	100	0.00%

Sumber : Kompas, 6 maret 2002

Data tersebut menunjukkan bahwa, secara kuantitatif bangsa Indonesia memiliki kekuatan atau potensi usaha mikro, kecil dan menengah yang sangat signifikan. Potensi usaha mikro, kecil dan menengah jumlahnya sangat banyak, distribusi cukup luas dan memiliki keunggulan komparatif dalam penyerapan dan kontribusi tenaga kerja dibandingkan usaha besar. Usaha mikro, kecil dan menengah lebih dikenal dengan sebutan ekonomi kerakyatan (ekora), yaitu ekonomi yang terdiri dari sejumlah usaha kecil, dengan orientasi usaha masih sekitar pemenuhan kebutuhan subsistensi, dikelola oleh rakyat, modal dan akumulasinya terbatas, teknologi dan manajemen tradisional, padat karya dan *output* produksi diperuntukan lagi bagi rakyat (Rustiani, 1996). Ekora memiliki sejumlah keunggulan, antara lain: (a) sebagai penyedia barang-barang murah untuk keluarga, (b) efisiensi dan fleksibilitas usaha yang tinggi, (c) sumber penghasil wirausaha baru, (d) profitabilitas yang tinggi, dan (e) kemampuan pengembalian pinjaman yang tinggi. Sedangkan kelemahannya terletak pada kemampuan manajerial yang rendah, teknologi bersifat tradisional, dan modal yang terbatas.

Mengacu pada keunggulan tersebut dan mempertimbangkan berbagai kelemahan yang dimiliki oleh usaha besar (penyerapan dan kontribusi tenaga kerja relatif kecil, terkonsentrasi pada kelompok/orang dekat dengan sumber kekuasaan, tingkat kemacetan pinjaman yang tinggi, *moral hazard* yang tinggi, tidak tahan terhadap guncangan global, dan sebagainya), maka diperlukan upaya revitalisasi pembangunan ekonomi Indonesia

yang berbasis ekonomi kerakyatan (*community based economic development*) untuk memantapkan fundamental ekonomi Indonesia. Pilihan pada ekora sangat strategis karena secara empiris telah teruji selama masa krisis multidimensional dan sebagai instrumen pemerataan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 2. Reaktualisasi Pembangunan Sosial Seiring Pembangunan Ekonomi

Strategi ini dilakukan untuk mereduksi berbagai ketimpangan yang terjadi, khususnya ketimpangan personal berbagai *stakeholders* pembangunan melalui reaktualisasi modal sosial secara sinergis dan simultan dengan modal fisik, modal manusia dan modal alamiah. Dasar rasionalitas dari strategi ini, mengacu pada perilaku yang tidak normatif yang diamini oleh *stakeholders* pembangunan Indonesia. Realitas tersebut merupakan konsekuensi dari minimnya modal sosial yang dimiliki mereka. Menurut Uphoff (1999), ciri-ciri orang yang memiliki modal sosial yang minim dan yang banyak (maksimal) seperti terlihat pada tabel 3.

**Tabel 3**  
**Ciri-Ciri Manusia Berdasarkan Kadar Modal Sosial**

No.	Kadar Modal Sosial	
	Rendah ( <i>Minimized</i> )	Tinggi ( <i>Maximized</i> )
1.	<i>Self-interest</i>	Komitmen pada kesejahteraan bersama
2.	<i>Self-aggrandizement</i>	<i>Altruism</i>
3.	<i>Selfishness</i>	<i>Self-sacrifice</i>
4.	<i>Autonomy</i>	<i>Merger of individual interest</i>
5.	<i>Zero sum-game</i>	
6.	Interdependent yang berfokus pada kepentingan diri	

Sumber : Uphorff (Dasgupra dan Seregeldin, 1999)

Mencermati realitas tersebut dan mengacu pada konsep Rothman (1984), maka disusun tiga model intervensi, antara lain:

### a. Model *Social Action*

Model *social action* menekankan pada gerakan pembangunan sosial yang dilakukan secara partisipatif (*collective action*). Pembangunan dilakukan sebagai gerakan moral yang lebih mengutamakan pembangunan modal sosial, seperti : kepatuhan pada sistem norma (*norms*), tata nilai (*values*), sikap (*attitudes*), keyakinan (*beliefs*), budaya bernegara (*civic culture*), saling percaya (*social trust*), solidaritas dalam bekerjasama (*cooperative behavior*), peran dan aturan main (*role and rules*), jaringan kerja (*networks*), hubungan interpersonal (*interpersonal relationship*), tata cara dan keteladanan (*procedures and precedents*), organisasi sosial (*social organization*), ketertarikan horizontal dan vertikal (*horizontal and vertical link-ages*).

Secara kuantitatif, proporsi model sosial yang diintervensi dalam pembangunan ekonomi relatif lebih banyak (kurang lebih 75 persen) dibandingkan ketiga modal yang lain (manusia alamiah dan fisik). Dengan demikian model ini lebih dikenal dengan pembangunan ekonomi berbasis pembangunan sosial.

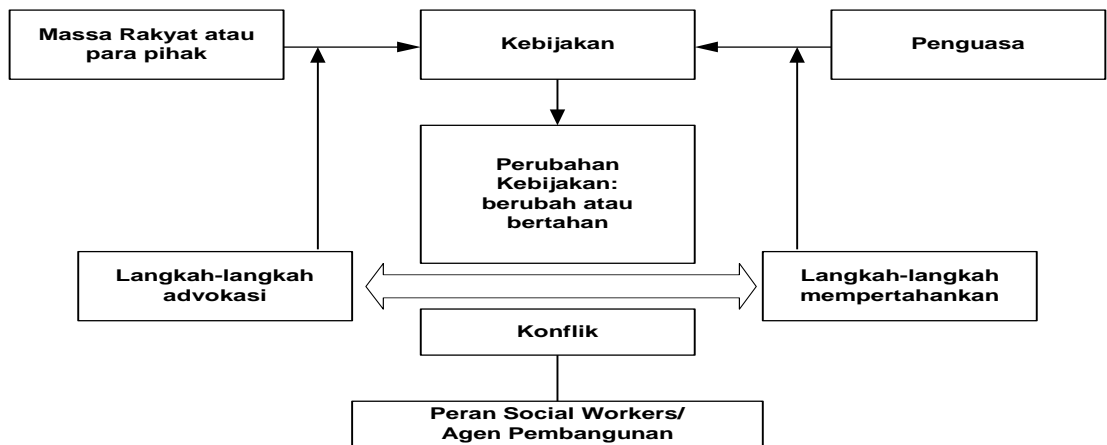


b. Model *Social Policy*

Model *social policy* lebih menekankan pada perombakan kebijakan yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan relasi kekuasaan, upaya deregulasi atau diciptakannya regulasi baru untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, hak-hak kepemilikan, atau hak-hak masyarakat sipil.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi kerakyatan, diperlukan beberapa upaya advokasi untuk mengubah kebijakan dalam sistem agribisnis, antara lain: (1) subsistem agronomi (sarana produksi), (2) subsistem usaha tani/produksi (lokasi, pemilihan komoditas, pola usaha tani, teknologi yang digunakan), (3) subsistem agrobisnis/pengolahan hasil (sarana dan prasarana usaha), (4) subsistem pemasaran (harga, produk, *market intelligence*), dan (5) subsistem penunjang (perbankan/kredit, tata niaga, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan dan penyuluhan/pendampingan usaha (Padmowihardjo, 1995).

Upaya advokasi kebijakan terhadap penguasa dapat dilakukan oleh masyarakat dengan dukungan agen pembangunan (gambar 2).

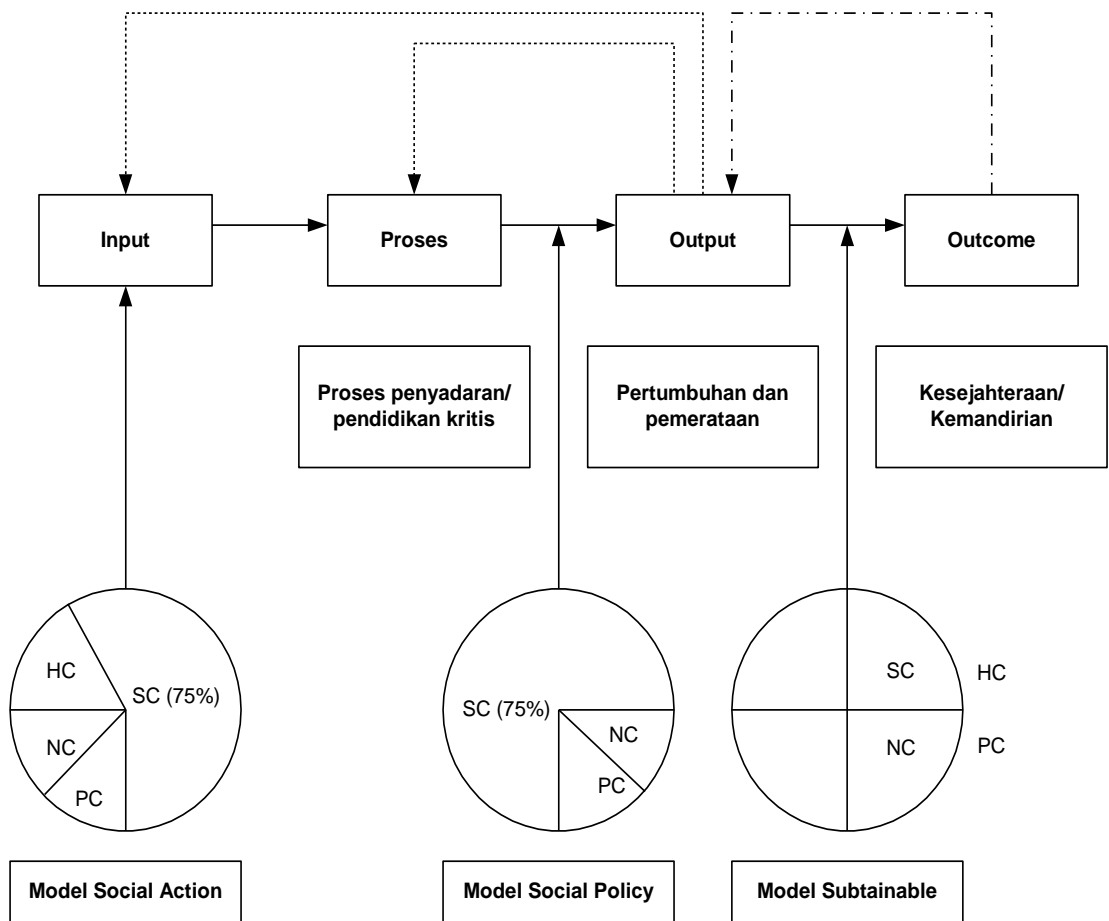


**Gambar 2**  
**Upaya Advokasi Kebijakan Melalui “Agen Pembangunan”**

Untuk mengubah kebijakan yang saling menguntungkan, maka diperlukan intervensi modal sosial yang masih relatif tinggi (kurang lebih 50 persen) antara pelaku ekora dengan pembuat kebijakan. Model ini lebih dikenal dengan pembangunan ekonomi yang ditunjang oleh pembangunan sosial.

c. Model *Sustainable*

Model berkesinambungan (*sustainable*) menekankan pada intervensi modal sosial, modal manusia, modal fisik dan modal alamiah (*environment*) secara sinergis dan berimbang dalam pembangunan ekonomi. Model ini lebih dikenal dengan pembangunan ekonomi seiring dengan pembangunan sosial (Kartasasmita, 1996), atau model pembangunan yang mandiri (Hattne, 2001), atau pembangunan berkelanjutan karena semua faktor produksi (*total factors productivity*) digunakan secara berimbang (Anwar, 2002). Hubungan antara ketiga model tersebut ditampilkan pada Gambar 3.



Keterangan : SC = *Social Capital*; HC = *Human Capital*; NC = *Natural Capital*; PC = *Physical Capital*

**Gambar 3.**  
**Hubungan Keterkaitan Antara**  
**Ketiga Model Intervensi Pembangunan Ekonomi**

#### D. Penutup

Pembangunan ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan Indonesia selama ini, secara empiris telah menghasilkan multikrisis yang berkepanjangan, khususnya terjadinya ketimpangan personal (disamping ketimpangan struktural dan ketimpangan relasi kekuasaan) pada berbagai *stakeholders* pembangunan.

Mencermati realitas tersebut, maka dirasa perlu untuk memberikan pemikiran kritis sebagai wujud kepedulian sekaligus keprihatinan melalui upaya kajian model alternatif pembangunan ekonomi Indonesia, dalam menghadapi era globalisasi yang mau tidak mau ataupun siap tidak siap harus dijalani. Dengan demikian agar dapat bersaing dibutuhkan kesiapan dan kemandirian bangsa yang perlu dimulai dari kesiapan dan kemandirian secara individu.

Berdasarkan penjelasan di atas maka paling tidak, ada dua strategi yang seyogianya dapat dikombinasikan dalam implementasinya, yakni: pertama, revitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) atau pemberdayaan ekonomi kerakyatan atau pembangunan ekonomi berbasis masyarakat (*community based economic development*), kedua, reaktualisasi pembangunan sosial seiring pembangunan ekonomi. Melalui kedua strategi tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai pemerataan yang berkeadilan sosial, bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berkesinambungan akan tercapai. Meskipun disadari bahwa semua upaya untuk perbaikan dan kemajuan membutuhkan pengorbanan, seperti satu ungkapan : "*there are no such things as free for lunches*".

## Referensi

- Aditjondro, G.J. 2001. *Ketika Semerbak Cengkih Tergusur Asap Mesiu: Tragedi Kemanusiaan Maluku di balik Konspirasi Militer, Kapitalis Birokrat, dan Kepentingan Elit Politik*. Jakarta: Tapak Ambon.
- Anwar, A. 2002. *Makalah Pada Seminar Sehari Tentang Kebijakan Pengawasan Baitul Maal Wat Tanwil dari Lembaga Keuangan Mikro*. Jakarta.
- Chotim, E.E dan Handayani, A.D. 2001. *Lembaga Keuangan Mikro Dalam Sejarah*. Jurnal Analisis Sosial, Volume 6, Nomor 3 Desember.
- Damanhuri, D.S. 1996. *Ekonomi Politik Alternatif. Agenda reformasi Abad 21*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kartasasmita, G. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Cides.
- Kompas Tanggal 29 Oktober halaman 15.
- Kompas, 20 Pebruari 1997
- \_\_\_\_\_, 17 September 2001
- \_\_\_\_\_, 29 september 2001
- \_\_\_\_\_, 6 Maret 2002
- \_\_\_\_\_, 7 Maret 2002
- \_\_\_\_\_, 28 Maret 2002
- \_\_\_\_\_, 11 April 2002
- Padmowihardjo. 1995. *Materi Pokok LUHT 4446/2SKS/Modul 1-6*. Masalah Khusus. Universitas Terbuka.
- Rothman, J. 1984. *Approaches to Community Intervention dalam Strategies of Community Intervention*. Columbia University Press.
- Rustiani, F.F (Ed). 1996. *Prosiding Dialog Nasional dan Lokakarya Pengembangan Ekonomi Rakyat dalam Era Globalisasi: Masalah, Peluang dan Strategi Praktis*. Yayasan Akatiga dan Yapika.
- Tilaar, H.A.R. 1997. *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi..* Jakarta: Gramedia Widiasara.
- Uphoff, N. dalam Dasgupta, P. dan Seregeldin, I. 1999. *Sosial Capital. A Multifaceted Perspective*. Washington D.C.: The World Bank.